ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Nama : Marisa Novalia

NIM : 22 2011 180

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2015

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : Marisa Novalia

NIM : 22 2011 0180

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2015

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marisa Novalia

Nim : 22 2011 180

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan konsekuensinya.

Palembang, 2015

Yang membuat pernyataan,

Marisa Novalia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	**: Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang**
Nama	**: Marisa Novalia**
Nim	**: 22 2011 180**
Fakultas	**: Ekonomi dan Bisnis**
Program Studi	**: Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok	**: Akuntansi Sektor Publik**

Diterima dan Disahkan
Pada tanggal,

Pembimbing

(Mizan,S.E.,M.S.i,Ak.,CA)
NIDN/NBM : 0206047101/859196

Mengetahui
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

(Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si)
NIDN/NBM : 0228115802/1021961

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- *Tidak ada seorangpun yang tidak pernah jatuh/gagal, namun mereka yang kembali bangkitlah yang akan berhasil*
- *Percaya lah dengan kebaikan yang ALLAH tetapkan dan tak akan tertukar dengan orang lain.*

(Marisa Novalia)

Ku persembahkan kepada :

- *Bapak ku tercinta Komari*
- *Ibu ku tercinta Misratini (Almh)*
- *Saudara ku tersayang Yuli Susanti*
- *Seseorang yang mendampingiku kelak*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamater tercinta*

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marisa Novalia

Nim : 22 2011 180

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan konsekuensinya.

Palembang, 2015

Yang membuat pernyataan,

Marisa Novalia

بسم الله الرحمن الرحيم

PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang".

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orangtuaku dan saudara ku yang telah mendidik dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Mizan, S.E, M.Si., Ak., CA yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Abid Djazuli, S.E, M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Fauzi Ridwan, SE, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.

3. Ibu Hj. Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si dan ibu Welly, S.E., M.Si., selaku ketua Program Studi Akuntansi dan sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Orba Kurniawan, SE. SH., M.Si selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Hendratman selaku Kabag Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kota Palembang.
7. Rahmat Ribath,S.Pd seorang lelaki yang selalu memberiku semangat, motivasi, dan tak henti-hentinya mendo'akan keberhasilan ku.
8. Pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis berupa materiil dan spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Desember 2015

Penulis

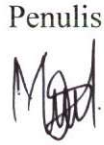

Marisa Novalia

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN/COVER i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

HALAMAN PRAKATA vi

HALAMAN DAFTAR ISI viii

HALAMAN DAFTAR TABEL xii

HALAMAN DAFTAR GAMBAR xiv

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN xv

ABSTRAK xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya 8

B. Landasan Teori 11

1. Pengertian Retribusi Daerah 11

2. Objek Retribusi 12
3. Penggolongan Retribusi Daerah 13
4. Jenis-jenis Retribusi Daerah 15
5. Pengertian Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum 22
6. Tata Cara Pembayaran Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum 25
7. Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum 25
8. Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir 26
9. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum 27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 28
B. Tempat Penelitian 29
C. Operasionalisasi Variabel 29
D. Data Yang Digunakan 30
E. Teknik Pengumpulan Data 31
F. Analisis Data dan Teknik Analisis 32
1. Analisis Data 32
2. Teknik Analisis 33
a. Analisis Kualitatif 33
b. Analisis Kuantitatif 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 34

1. Sejarah Singkat tentang Dinas Perhubungan Kota Palembang 34
2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang 35
3. Tujuan, Sasaran, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang 35
4. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 39

B. Pembahasan Hasil Penelitian 54

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kota Palembang 54
   a. Penentuan Target Yang Belum Realistis 54
   b. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Di Lapangan 56

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.I	Target Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Palembang	5
Tabel III.I	Operasionalisasi Variabel	30
Tabel IV.I	Data Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Palembang.....	54

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.I Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang 40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Kegiatan Penelitian

Lampiran 2 : Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Fotokopi Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian

Lampiran 4 : Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghapal Al-Qur'an

Lampiran 5 : Fotokopi Sertifikat TOEFL

Lampiran 6 : Fotokopi Sertifikat KKN

Lampiran 7 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Marisa Novalia/222011180/2015. Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Palembang, dan Faktor apa yang paling dominan penyebab tidak tercapainya target retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan target retribusi parkir yang didasarkan pada data historis. Sumber penerimaan yang masih menggunakan perhitungan secara tradisional hanya menambahkan dan mengurangi penerimaan di setiap harinya. Sistem pengendalian dan pegawasan dilapangan yang masih kurang disebabkan masih terdapatnya parkir-parkir liar yang belum dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang selaku wadah yang mengelola retribusi parkir.

Kata kunci : Retribusi Parkir, Peraturan Daerah.

ABSTRACT

Marisa Novalia/22201180/2015/ The Analysis of Causative Factors Unreachable Target of the Acceptance Parking Levies at the Edge of the Public Road on Department of Transportation Palembang City.

The problems of this study were to find out the factors that cause what is not achieving the acceptance of parking levies on the Department of Transportation Palembang city, and what is the most dominant factor did not cause targets parking levies on the Department of Transportation Palembang City. The purpose of this study was to determine what factors that causes the failure to achieve the targets of the acceptance of parking levies on the Department of Transportation Palembang City

This study was a descriptive study. The data used were primary and secondary data. Techniques for collecting the data were documentation and interviews. Qualitative analysis was used in this study for analyzing the data.

The results of the study showed that the determination of the target parking levies based on the historical data, which the source of revenue were still using the traditional calculation, simply added and reduced the acceptance of parking levies in each day. There was still illegal parking which had not been managed by the Department of Transportation in Palembang City as the container that manages the parking levies.

Key words: *Parking levies, regional regulation.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk merubah dan memperbaiki kondisi suatu daerah. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan biaya, biaya tersebut salah satunya didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber utama penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pelaksanaan pembangunan daerah perlu kemandirian dalam hal pembiayaan yang berasal dari pendapatan dan didukung dengan diberlakukannya otonomi daerah. PAD semakin terasa konstribusinya yang cukup penting dari pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara hasil-hasil pembangunan. Inti dari otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri secara kreatif dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Menurut Abdul Halim (2007:101) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari :

a. Pajak daerah
b. Retribusi Daerah

c. Hasil pendapatan mili daerah da hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan

d. Lain-lain PAD yang sah

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu :

a. Jasa Umum

Jasa umum yaitu balas jasa oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Jasa Usaha

Jasa usaha yaitu jasa atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

c. Jasa Perizinan Tertentu

Jasa perizinan tertentu yang kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan jasa dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan keuangan, sarana atau

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kota Palembang merupakan salah satu Kota Besar di Pulau Sumatera selain Kota Medan, sebagai kota yang sebagian dikelilingi oleh sungai besar dan kecil serta rawa-rawa yang merupakan daerah pasang surut. Didukung dengan faktor-faktor letak geografis wilayah dan kultur historis yang kuat dengan kegiatan perekonomian serta perdagangan yang cukup besar khususnya didaerah Provinsi Sumatera Selatan. Faktor penunjang lainnya adalah kegiatan perdagangan dan jasa lainnya, serta dukungan sarana dan prasarana serta fasilitas kota yang memadai seperti Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Stasiun Kereta Api Kertapati, Terminal Bus Karya Jaya dan Alang-Alang Lebar, Dermaga Pelabuhan Boom Baru, Pusat Pembelanjaan (Mall) PTC, Palembang Square, Internasional Plaza (IP), Perhotelan, Pasar Induk Jakabaring yang menjadikan Kota Palembang sebagai Kota Metropolitan, Mandiri dan Berkualitas Tahun 2009. Terutama dimotivasi Piala Adipura dengan semboyan "Palembang Bari" yang diwujudkan menjadi kota yang bersih bebas dari sampah yang artinya tidak ada lagi sampah berserakan.

Dinas Perhubungan Kota Palembang dapat menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang khususnya pada retribusi pajak parkir ditepi jalan umum, pada Dinas Perhubungan Kota Palembang kegiatan yang dikelolahnya adalah :

a. Pelayanan parkir

b. Penyediaan tempat parkir

Berdasarkan Peraruran Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2011 pada pasal 1 nomor 14 menyatakan bahwa parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Retribusi parkir merupakan retribusi umum yang merupakan bagian dari masyarakat yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan penyediaan dibidang lahan parkir yang baik yang tidak mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Menyadari pentingnya retribusi parkir maka pemerintah kota telah mempunyai kerangka dengan ditetapkannya peraturan retribusi daerah. Ditetapkannya peraturan retribusi daerah tersebut merupakan langkah nyata bagi pemerintah menghimpun potensi dalam negeri sebagai sumber penerimaan daerah dan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Dinas Perhubungan Kota Palembang merupakan instansi yang berwenang dalam menangani masalah parkir di Kota Palembang. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Palembang, yaitu melakukan pelayanan dibidang parkir tentunya menghadapi hambatan selain faktor-faktor pendukung yang ada. Terwujudnya keadaan kota yang rapi dari kendaraan yang diparkir secara rapi di tempat yang telah disediakan dan tidak mengganggu pengguna jalan yang lainnya

dengan didukung dari seluruh lapisan masyarakat, dengan cara selalu memarkirkan kendaraanya di tempat yang telah disediakan serta membayar retribusi parkir.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Palembang tentang penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dapat dilihat dari data berikut ini :

Tabel I.1
Target Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
Kota Palembang tahun 2012-2014

Tahun	Target	Realisasi	Persentasi tercapai	Persentasi tidak tercapai
2012	Rp 11.555.000.000,00	Rp 5.723.811.192,00	49,56 %	50,44 %
2013	Rp 6.297.000.000,00	Rp 5.253.836.863,03	83,43 %	16,57 %
2014	Rp 7.241.550.000,00	Rp 6.322.212.321,34	87,30 %	12,70 %

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2015

Berdasarkan tabel I.1 diatas menunjukkan bahwa pendapatan dari retribusi parkir tiga tahun terakhir belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut mungkin disebabkan beberapa faktor, antara lain penetapan target yang kurang realistis, kurangnya pengawasan terhadap petugas kolektor, dan faktor cuaca karena hujan yang tinggi.

Berdasarkan pada uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dirumuskan oleh penulis adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

D. Manfaaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

   Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam disiplin ilmu khususnya dalam pemungutan retribusi.

2. Bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi sebagaimana mestinya.

3. Bagi Almamater

hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan masalah retribusi daerah sehingga dapat dijadikan perbandingan dan pertimbangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul "Analisis Rendahnya Penerimaan Retribusi Kebersihan dan Retribusi Parkir Di Jalan Umum Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang" (Lingga Mayasari, 2008). Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi kebersihan dan retribusi parkir ditepi jalan umum pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi kebersihan dan retribusi parkir ditepi jalan umum.

Operasionalisasi variabel yang digunakan adalah hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi kebersihan dan retribusi parkir di tepi jalan umum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak dan pemerintah kota Palembang. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengkopi dokumen-dokumen atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan retribusi daerah, sedangkan analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan penerimaan retribusi kebersihan dan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Palembang tidak mencapai target. Tidak tercapainya target penerimaan retribusi kebersihan karena penentuan target retribusi yang kebersihan yang terlalu besar, tingkat kebocoran, sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan dan tingkat pelayanan. Sedangkan tidak tercapainya penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum dikarenakan jumlah titik parkir, tingkat kebocoran, sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan, pengawasan dari petugas dan adanya pemungutan parkir liar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama meneliti retribusi parkir di tepi jalan umum sedangkan perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu selain retribusi parkir penelitian sebelumnya melakukan penelitiannya di retribusi kebersihan.

Penelitian selanjutnya berjudul "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Padang" (Betti Arvita, 2010). Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi faktor tidak tercapainya penerimaan retribusi parkir pada UPT Perparkiran Kota Padang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Padang.

Operasionalisasi variabel yang digunakan adalah apa yang menjadi faktor tidak tercapainya realisasi penerimaan retribusi parkir. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi berupa data-data penerimaan retribusi parkir dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan retribusi daerah, sedangkan wawancara dilakukan langsung dengan kepala UPT perparkiran Kota Padang dan juru parkir yang ada di Kota Padang. Analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan faktor utama penyebab rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir adalah besarnya tingkat kebocoran yang ada, kurangmya pengawasan dari pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan parkir dan terdapat pemungutan parkir liar dari orang yang tidak bertanggung jawab.

Persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama meneliti tentang retribusi parkir. Perbedaannya terletak pada analisis data yang digunakan dalam penelitian, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan analisis kuantitatif menggunakan perhitungan.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2009:14) menyatakan retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pelayanan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Marihot P. Siahaaan (2005:6) retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah suatu pungutan daerah yang diperuntukkan sebagai pembayaran disebabkan pemakaian atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milik daerah karena jasa yang diberikan oleh daerah, baik jasa langsung maupun tidak langsung yang khusus diberikan untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa :

a. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

b. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib untuk melaksanakan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

c. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah yang bersangkutan.

2. Objek Retribusi

Menurut undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa : objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah, tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Menurut undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, objek terdiri dari :

a. Jasa Umum

Jasa umum adalah balas jasa oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

b. Jasa Usaha

Jasa Usaha adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

c. Jasa Perizinan Tertentu

Jenis perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian perizinan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, saran dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kebersihan lingkungan.

3. Penggolongan Retribusi Daerah

Menurut undang-umdang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerahdibagi atas tiga golongan :

a. Retribusi Jasa Umum

Kriteria Retribusi Jasa Umum sebagai berikut :

1) Retribusi umum bersifat bukan pajak dan bersifat retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
2) Jasa yang bersangkutan bukan merupakan wewenang daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan pemanfaatan umum.
4) Jasa retribusi layak untuk dikenakan retribusi.
5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan.

6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang baik.

b. Retribusi Jasa Usaha

Kriteria Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut :

1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secar penuh oleh pemerintah daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Kriteria Perizinan Tertentu sebagai berikut :

1) Perizinan temasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka azas desentralisasi.
2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak

negative dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayaidari retribusi perizinan.

4. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Daerah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Adapun jenis-jenis retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu :

1) Retribusi Jasa Umum

a) Retribusi pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan puskesmas, balai pengobatan dan rumah sakit umum daerah. Retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

b) Retribusi pelayanan persampahan

Pelayanan persampahan atau kesehatan meliputi pengambilan pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.

c) Retribusi pergantian biaya cetak tanda penduduk dan akta catatan sipil

Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan pengaburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengukuran, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

e) Retribusi parkir di tepi jalan umum

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum sebagai tempat parkir mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Retribusi pasar

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran dan los yang dikelola pemerintah daerah dan disediakan khusus untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlak, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau perizinan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.

i) Retribusi penggantian alat cetak peta

Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah seperti peta pasar(peta garis), peta foto, peta digital, peta teknis(peta struktur).

j) Retribusi pengujian kapal perikanan

Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.

2) Retribusi Jasa Usaha

a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah meliputi pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang untuk pesta, pemakaian kendaraan atau alat-alat berat/ alat-alat besar milik negara. Tidak termasuk pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pencanangan tiang listrik atau telepon maupun penanaman kabel listrik/telepon di[inggir jalan umum.

b) Retribusi pasar grosir dan pertokoan

Pasar grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan pihak swasta.

c) Retribusi tempat pelelangan

Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan termasuk pengertian pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan tempat pelelangan.

d) Retribusi Terminal

Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

e) Retribusi tempat parkir khusus

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan dikelola

oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

f) Retribusi tempat penginapan/villa

Pelayanan tempat penginapan/villa milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/villa yang dimiliki dan atau yang dikelola oleh pihak daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

g) Retribusi penyedotan tinja

Pelayanan penyedotan tinja adalah pelayanan penyedotan tinja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

h) Retribusi rumah potong hewan

Pelayanan rumah potong hewan adalah penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

i) Retribusi pelayanan pelabuhan Kapal

Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

j) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

k) Retribusi penyeberangan diatas air

Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

l) Retribusi pengelolaan limbah cair

Pelayanan pengelolaan limbah cair adalah pelayanan pengelolaanlimbah cair rumah tangga, perkantoran dan industry yang dikelola atau dimiliki oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

m) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Pelayanan penjualan produksi usaha adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah antara lain, bibit/benih tanaman, bibit ternak, bibit ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha BUMD, BUMD, dan pihak swasta.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

a) Retribusi izin mendirikan bangunan

Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan satu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin adalah kegiatan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis pembangunan dan rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB). Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan tempat penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

c) Retribusi izin gangguan

Retribusi izin gangguan adalah memberikan izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk usaha/kegiatan yang telah ditentukan pemerintah daerah.

5. Pengertian Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Beberapa pengertian yang berkaitan dengan retribusi parkir ditepi jalan umum menurut Nomor 16 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

a) Retribusi parkir ditepi jalan umum adalah biaya yang dipungut atas pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

b) Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan lahan parkir yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Ada juru parkir nya, ada yang mengatur letak kendaraan yg diparkirkan agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lainnya.

c) Tempat-tempat parkir yang ada dan di atur dalam Peraturan Daerah adalah tempat parkir umum, tempat parkir insidentil, tempat parkir khusus, taman parkir, gedung parkir, dan tempat parkir pool bagi kendaraan yang melanggar ketentuan dibidang lalu lintas.

d) Karcis adalah tanda pembayaran retribusi parkir.

e) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

f) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah kota.

g) Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh wajib retribusi.

h) Subjek retribusi parkir pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

i) Objek retribusi parkir pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j) Retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk golongan retribusi jasa umum.

k) Cara mengukur tingkat retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan dan fasilitas serta biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kota untuk menyelenggarakan parkir.

l) Petugas pemungutan adalah orang yang diberikan tugas memungut retribusi parkir.

6. Tata Cara Pembayaran Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Tata cara pembayaran Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagai berikut :

a) Pembayaran retribusi parkir harus dilakukan secara tunai atau lunas.

b) Tata cara pembayaran adalah penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

7. Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Tarif retribusi parkir adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang diberikan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang. Tarif dapat ditentukan atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan dengan prinsip dan sasaran tertentu.

Cara mengukur ttingkat retribusi parkir adalah pelayanan dan fasilitas serta biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kota untuk menyelenggarakan retribusi parkir. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berdasarkan besarnya biaya penyediaan jasa dibidang perparkiran.

8. Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir

Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum, mekanisme pemungutan retribusi parkir adalah sebagai berikut :

a) Pendaftaran

Wajib retribusi terlebih dahulu harus mengisi SPdORD. SPdORD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap seta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. SPdORD ini ditetapkan oleh Walikota.

b) Penetapan Retribusi

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Penetapan tarif retribusi ditetapkan oleh Walikota. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

c) Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD yang dimaksud dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.pemungutan retribusi dilarang diborongkan. Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas umum daerah. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan Walikota.

d) Penagihan Retribusi

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkannya segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempat pembayaran. Dalam jangka waktu 7 hari setelah surat teguran. Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Surat teguran/peringatan/surat lain dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

e) Pembayaran Retribusi

Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas umum daerah selambat-lambatnya setelah dilakukan pembayaran, wajib retribusi akan mendapatkan tanda bukti pembayaran danm akan dicatat dibuku penerimaan. Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku retribusi ditetapkan oleh Walikota.

9. Faktor-Faktor penyebab tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Menurut Susilo dan Halim (2002:49) dalam kajian tentang keuangan daerah Pemerintah Kota Malang yang menganalisis masalah dalam penerimaan sumber-sumber keuangan daerah yang berasal dari dapat mempengaruhi PAD yang dapat diterima oleh Pemerintah Daerah adalah belum optimalnya pajak dan retribusi daerah dimana penyebabnya ada tiga faktor :

a) Penerimaan target belum terealisasi

Ini dilihat dari :

1) Sistem penentuan target yang didasarkan pada data histories

2) Belum dimilikinya data based atau data dasar mengenai sumber penerimaan

b) Masih tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan ini dikarenakan:

1) Belum efektifnya pemberlakuan sanksi

2) Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan.

c) Belum primanya layanan karena terbatasnya sumber daya manusia atau petugas pelaksana dilapangan serta adanya biroklasi dalam layanan pemungutan pajak dan retribusi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:5) jenis penelitian menurut tingkat eksplentasinya adalah sebagai berikut :

1) Penelitian Deskriptif

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengatahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian pengembangan karena meluas pada sejumlah variasi, situasi dan kondisi. Oleh karena itu tidak mendalam melainkan hanya beberapa saja yang merupakan masalah.

2) Penelitian Asosiatif

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai dua tingkatan yang tertinggi bila dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif. Dengan penelitian ini, maka akan dapat dibuat suatu teori yang dapat berfungsi untuk dapat menjelaskan, meramalkan dan mengambil suatu gejala.

3) Penelitian Komparatif

Yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk memperoleh data yang mampu memberikan gambaran yang jelas tentang situasi yang terjadi pada tempat untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat yang terjadi pada suatu daerah (unit penelitian yang akan diteliti) tertentu.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang yang beralamat di jalan Pangeran Sido Ing Lautan 35 ilir Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Telp (0711) 442547 Kode Pos 30146. Email :dishub_palembang@yahoo.co.id Website : www.dishub.palembang.go.id.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah devinisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mengklasifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur.

Tabel III.I
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Faktor-faktor *penyebab tidak* tercapainya target penerimaan retribusi	Hal-hal yang *menyebabkan tidak* tercapainya target penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.	- Penerimaan target yang belum *realistis* - Masih tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan - Belum primanya layanan karena terbatasnya sumber daya manusia atau petugas pelaksana dilapangan.

Sumber : Penulis, 2015

D. Data Yang Digunakan

Menurut Nur dan Bambang (2009: 146-147) bahwa data terbagi dua :

1) Data primer

   Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara)

2) Data Sekunder

   Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berikut adalah data primer yang digunakan :

a. Sejarah singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang
b. Stuktur organisasi dan pembagian tugas Dinas Perhubungan Kota Palembang

c. Data non keuangan meliputi besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum dan data karyawan, data cuaca hujan, dan metode penetapan anggaran Dinas Perhubungan Kota Palembang

d. Visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Palembang

e. Data keuangan meliputi target penerimaan retribusi parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Kutipan-kutipan dari buku-buku yang menyangkut tentang penelitian yang saya lakukan ini.

b. Data yang bersumber dari internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009: 402-425) menyatakan bahwa ada empat cara yang digunakan dalam metode pengumpulan data terdiri dari :

1) Wawancara

Merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab kepada responden.

2) Observasi

Merupakan proses penelitian dalam melihat situasi penelitian.

3) Kuissioner

Merupakan slah satu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Alat pengumpulan data berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden.

4) Dokumentasi

Merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian baik berupa sumber tertulis, flim, gambar, karya-karya monumental yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

Dari keempat teknik pengumpulan data tersebut, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu dengan menanyakan langsung kepada kepala bagian tata usaha retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dokumen-dokumen yang diperoleh langsung dari Dinas Perhubungan Kota Palembang.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Sugiyono (2009: 13-14) menyatakan bahwa analisis data dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

2) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif yaitu analisis yang didapat dari hasil wawancara dengan cara menguraikan dan menjelaskan penerimaan retribusi pakir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang memusatkan perhatian pada sesuatu yang ada dengan mengumpulkan, mencatat, menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisis dan menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk tabel dan akhirnya diambil dalam bentuk kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang

Dibentuknya Dinas Perhubungan tidak serta merta di ikuti perubahan instansional, melainkan tahp-tahap instansional yaitu berawal dari terbentuknya dinas LLAJ Palembang I berubah menjadi Dinas LLAJR Wilayah 1, berubah lagi menjadi cabang dinas I LLAJR Tingkat II Kodya Palembang.

Untuk teknisi administrasi, setelah dikeluarkannya peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dinas daerah, bahwa dinas daerah yang ada di Kota Palembang terdiri dari sembilan belas jenis, salah satunya adalah Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang perhubungan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Palembang.

Dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas parkir di tepi jalan umum. Kepala daerah melalui dinas perhubungan melakukan pembinaan, meliputi pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan pelayanan perizinan tertentu.

2. Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang

Visi Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya pelayanan perhubungan yang berkualitas dalam rangka menuju Palembang Kota Internasional.
b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia yang kreatif dan proaktif untuk mengantisifasi perkembangan IPTEK
c. Meningkatkan pembangunan dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan serta mengembangkan manajemen keselamatan perhubungan.

Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang

a. Meningkatkan pelayanan jasa perhubungan yang lebih berkualitas
b. Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyedia dan pengguna jasa perhubungan di kota Palembang.

3. Tujuan, Sasaran, Tugas Pokok dan Fungsi Dians Perhubungan Kota Palembang

a. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Palembang
    1) Meningkatkan kualitas aparat perhubungan dan disiplin masyarakat dalam rangka menciptakan lalu lintas yang tertib dan nyaman, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
    2) Terwujudnya sistem jaringan transportasi komunikasi dan informasi efektif guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi dalam menunjang pelayanan masyarakat.

b. Sasaran Dinas Perhubungan Kota Palembang

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang igin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah :

1) Terwujudnya transportasi darat sesuai kebutuhan masyarakat
2) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel

c. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Palembang

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan
2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan dibidang perhubungan
3) Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Perhubungan pembinaan unit pelayanan teknis Dinas Perhubungan dan cabang Dinas Perhubungan

d. Fungsi Pokok Dinas Perhubungan Kota Palembang

1) Merumuskan kebijakan teknis dibidang perhubungan yang sifatnya mendukung secara operasional kebijakan pemerintah Kota Palembang
2) Memberikan perizinan dan pelaksanaan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

3) Melaksanakan penilaian (UPTD) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
4) Memberikaan sarana-sarana dan perlindungan kepada masyarakat tentang langkah-langkah dalam bidang perhubungan.

4. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

a. Struktur Organisasi

Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada struktur dan efektifitas kinerja anggota organisasi tersebut. Struktur organisasi adalah susunan atau gambaran yang menunjukkan tentang pembagian tugas dan tergantung dan tanggung jawab serta wewenang dari masing-masing fungsi dan personalianya. Struktur organisasi akan memperhatikan hubungan pada bidang mana tugas harus dilaksanakan serta kemana pelaporan harus disampaikan agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan berbentuk garis karena wewenang akan mengalir secara langsung dari Kepala Dinas kemudian ke kepala sub bagian dan kemudian terus ke pegawai-pegawai dibawahnya.Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang terdiri dari :

1) Kepala Dinas
2) Sekretaris :

(a) Sub bagian umum dan perlengkapan

(b) Sub bagian keuangan

(c) Sub bagian kepegawaian

3) Bidang perencanaan :

(a) Seksi penyusunan Perencanaan program

(b) Seksi manajemen Rekayasa Lalu Lintas

(c) Seksi Evaluasi Pengelolaan Data

4) Bidang Lalu Lintas:

(a) Seksi Pengendalian Operasional

(b) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

(c) Seksi Pembinaan Keselamatan dan ketertiban Lalu Lintas

5) Bidang Angkutan :

(a) Seksi pembinaan angkutan orang

(b) Seksi pembinaan angkutan barang

(c) Seksi pembinaan perparkiran

6) Bidang teknik Sarana dan Fasilitas Perhubungan :

(a) Seksi perlengkapan jalan dan jembatan

(b) Seksi pembinaan fasilitas perhubungan

(c) Seksi pembinaan perbengkelan dan korelasi

7) Bidang Pelayanan Komunikasi :

(a) Seksi pembinaan kelompok informasi social

(b) Seksi pelayanan komunikasi mobile

(c) Seksi ceramah dan dialog

8) Bidang Media Informasi :

   (a) Seksi media cetak

   (b) Seksi pembinaan radio, TV dan Flim

   (c) Seksi pengendalian informasi dan pameran

9) UPTD balai pengujian kendaraan bermotor :

   (a) Sub bagian Tata Usaha

10) UPTD Terminal :

   (a) Sub bagian tata usaha

   (b) Pembagian Tugas

GAMBAR IV.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang

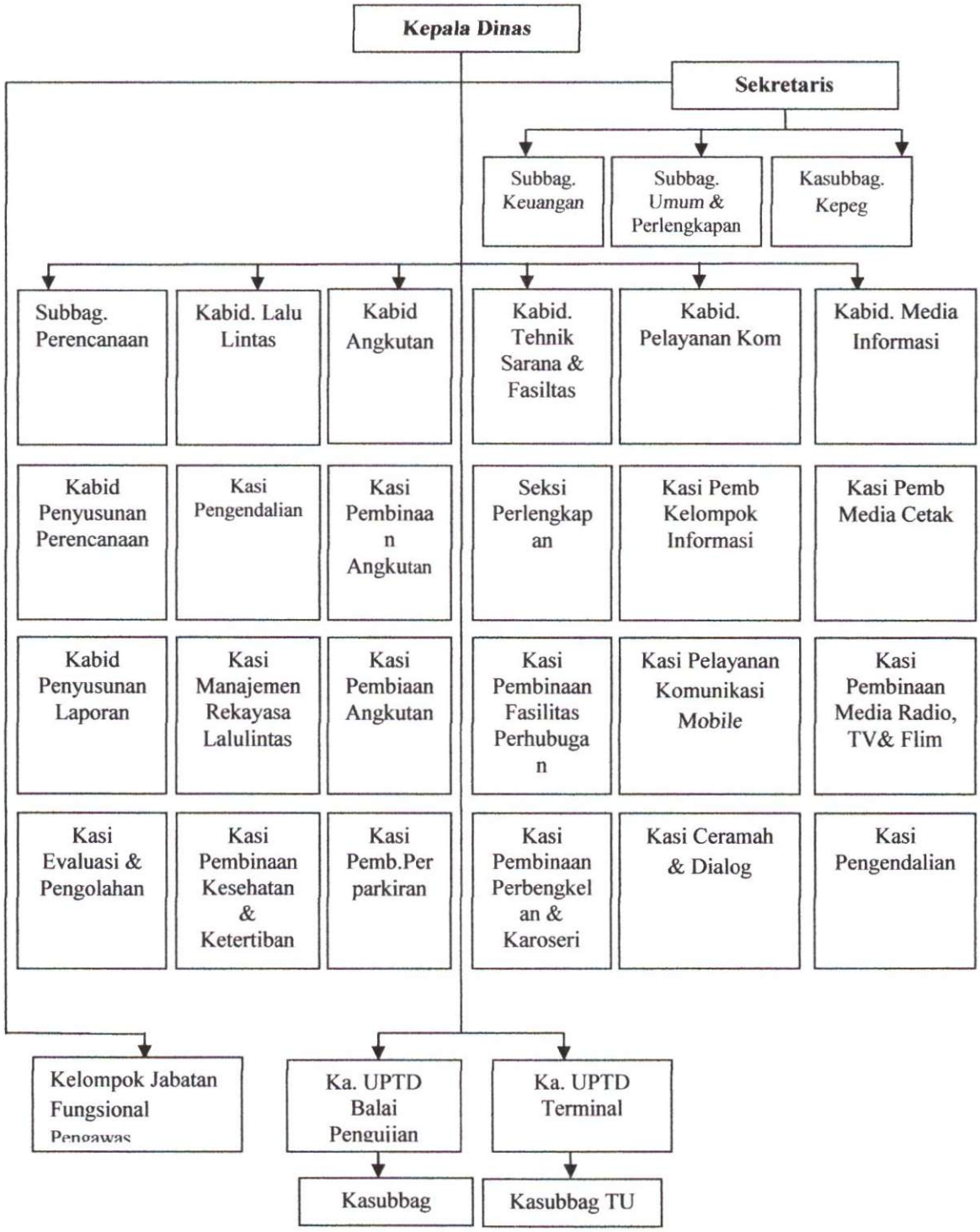

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang

b. Pembagian Tugas

Berdasarkan stuktur organisasi yang ada, maka pembagian tugas dan fungsi organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas Menyelenggarakan sebagian urutan rumah tangga daerah. Dalam bidang lalu lintas yang diberikan pemerintah Kota Palembang antara lain :

a) Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang perhubungan dengan kebijakan yang digariskan oleh kepala daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

b) Merumuskan kebijakan operasional pembangunan daerah dibidang pasar.

c) Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsure-unsur pemerintah daerah dan instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.

d) Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2) Wakil Dinas

Membantu tugas-tugas kepala Dinas membuat program kerja dinas perhubungan jangka pendek, menengah, jangka panjang.

Memberikan saran atau pertimbangan kepada kepala dinas mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perku diambil dalam bidang dan tugasnya. Wakil kepala dinas mempunyai fungsi :

a) Membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
b) Memberikan saran atau pertimbangan kepada kepala dinas mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
c) Menjalankan tugas dan fungsi kepala dinas sehari-hari apabila kepala dinas berhalangan atau berada diluar daerah berdasarkan surat petunjuk kepala Dinas.

3) Sub bagian keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
   a) Melaksanakan verifikasi pengeluaran anggaran
   b) Membantu laporan realisasi pengeluaran anggaran
   c) Membuat laporan realisasi penerimaan retribusi
   d) Membuat dan menghimpun data pengeluaran keuangan
   e) Membuat dan menghimpun data penerimaan keuangan
   f) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
   g) Menghimpun data dan pertanggung jawaban
4) Sub bagian umum dan perlengkapan
   a) Mengagendakan semua surat masuk dan keluar

b) Memfasilitasi semua tamu yang akan menghadap kepala dinas

c) Mengatur petugas piket kantor dan mendistribusikan surat-surat masuk

d) Membuat laporan keadaan barang perlengkapan dinas

e) Mengatur dan meneliti permintaan barang dan perlengkapan

f) Melaksanakan pengarsipan berkas-berkas kedinasan.

5) Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Melaksanakan pengendalian daftar hadir kepegawaian

b) Menyusun daftar hadir urut kepangkatan

c) Menyusun daftar kebutuhan pegawai

d) Membuat laporan kinerja dan daftar hadir pegawai

e) Merencanakan peningkatan pendidikan pegawai

6) Bidang Perencanaan Mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menghimpun meneliti rencana kerja tiap-tiap bidang untuk dijadikan program kerja

b) Mengatur dan mengkoordinir pelaksanaan penyusunan, perencanaan program, penyusunan laporan dan akuntabilitas, evaluasi dan pengelolaan data

c) Membantu mengawasi dan pengevaluasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program, penyusunan laporan dan akuntabilitas, evaluasi dan pengelolaan data

d) Melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bidang perencanaan pada atasan.

7) Seksi Penyusunan Perencanaan Program Mempunyai tugas :

a) Membantu perencanaan berdasarkan program dari bidang secretariat dan UPTD

b) Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran

c) Melaksanakan koordinasi kepada instansi yang berhubungan dengan perencanaan

d) Menyusun penetapan rencana yang strategis

8) Seksi Penyusunan Laporan Akuntabilitas mempunyai tugas :

a) Penyusunan lapoan penyelenggaraan pemerintah

b) Menyusun bahan-bahan laporan akuntabilitas

c) Menyusun penetapan kinerja dan membuat laporan kinerja

9) Seksi Evaluasi dan Pengelolaa Data mempunyai tugas :

a) Menyiapkan bahan evaluasi dari bidang secretariat

b) Menyusun pendataan selayang pandang

c) Menghimpun data dn bahan untuk rapat

d) Mengimpun dan mengola daa objek potensi

e) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas

10) Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas :

a) Membua dan mengusulkan rencana kerja bidang lalu lintas yang meliputi pegendalian operasional, mengenai rekayasa

lalu lintas serta pembinaan keselamatan ketertiban lalu lintas

b) Memfasilitaskan dan melayani pihak-pihak yang berkepentingan yang mempunyai urusan dengan bidang lalu lintas

c) Melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bidang lalu lintaspada atasan

11) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas :

a) Membuat rencana kegiatan operasional pengawasan lalu lintas

b) Melaksanakan pemantauan dn penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas

c) Melaksanakan tindaka korektif terhadap kebijakan lalu lintas

d) Melaksanakan pengaturan lalu lintas, pengawalan pejabat, tokoh masyarakat dan masyarakat umum

12) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas:

a) Membuat rencana pengaturan lalu lintas secara normative

b) Memelihara dn merawat rmbu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat serta alat pengendalian dan pengaman pemakai jalan

c) Memfasilitasi izin insidentif untuk pengangkutan alat-alat berat

13) Seksi Bimbingan dan Keselamatan mempunyai tugas :
    a) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan tentang hak dan kewajiban masyarakat terhadap kebijakan lalu lintas
    b) Memfasilitaskan usulan masyarakat yang akan menggunakan badan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas
    c) Merekomendasikan usulan masyarakat untuk pihak swasta yang akan membuat alat pembatas kecepatan dijalan umum
14) Bidang Angkutan mempunyai tugas :
    a) Membuat dan merencanakan rencana kerja bidang angkutan yang meliputi pembinaan agkutan orang, pembinaan angkutan barang, dan pembinaan perparkiran
    b) Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan pembinaan angkutan barang dan pembinaan perparkiran
    c) Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan pembinaan angkitan orang, angkutan barang dan pembinaan perparkiran
    d) Melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bidang angkutan pada atasan
15) Seksi Angkutan orang mempunyai tugas :
    a) Merencanakan kebutuhan jumlah angkutan orang berdasarkan perhitungan penumpang

b) Mengatur trayek kendaraan dalam kota Palembang

c) Mempersiapkan bahan dan menghitung tariff angkutan

d) Melaksanakan evaluasi izin trayek

16) Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas :

a) Merekomendasikan pemberian izin angkutan barangtor

b) Memfasilitasi izin bongkar muat barang

c) Memfasilitasi perizinan insidentil kendaraan bus yang menyimpang dari trayek

d) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi izin angkutan barang

17) Seksi Perparkiran mempunyai tugas :

a) Membuat perencanaan penetapan penunjukkan lokasi-lokasi perparkiran

b) Melakukan pembinaan terhadap petugas pelaksanaan parker

c) Membuat rencana penataan dan pembinaan kendaraan tidak bermotor

d) Mengevaluasi dan mengusulkan tariff perparkiran

18) Bidang Teknik Sarana dan Fasilitas Perhubungan mempunyai tugas :

a) Membuat dan mengusulkan rencana kerja bidang teknik sarana dan fasilitas perhubungan yang meliputi

perlengkapan jalan dan jembatan, pembinaan fasilitas perhubungan dan pembinaan pembengkelan dan karoseri

b) Membantu da mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan pembinaan fasilitas perhubungan perlengkapan jalan dan jembatan serta pembinaan perbengkelan dan karoseri

c) Melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bidang teknik sarana dan fasilitas pehubungan

19) Seksi Perlengkapan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

a) Mendata, menata, dan mengusulkan pembuatan papan nama jalan

b) Mengopname papan nama jalan dan papan petunjuk arah yang tidak standar

c) Mengkaji dan merekomendasikan pemasangan lampu penerangan jalan

20) Seksi Pembinaan Fasilitas Perhubungan mempunyai tugas :

a) Menata dan mengawasi pemanfaatan trotoar

b) Merekomendasikan pendirian perangkat telekomunikasi dan pembinaan konter ponsel

c) Merekomendasikan pendirian jasa pengiriman barang

21) Seksi Pembinaan dan Karoseri mempunyai tugas :

a) Membina dan mengawasi bengkel karoseri kendaraan bermotor

b) Memfasilitasi dan membina sekolah pengemudi

c) Memantau dan mengawasi dampak lingkungan bengkel kendaraan bermotor

d) Memberikan rekomendasi spesifikasi teknik pembuatan karoseri

22) Bidang Pelayanan Komunikasi mempunyai tugas :

a) Membantu dan mengusulkan rencana kerja bidang pelayanan komunikasi yang meliputi pembinaan kelompok informasi social pelayanan komunikasi mobile serta ceramah dialog

b) Memfasilitasi dan melayani pihak-pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan bidang tugas pelayanan komunikasi

c) Melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bidang pelayanan komunikasi kepada atasan

23) Seksi Pembinaan Kelompok Informasi Sosial mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

a) Mendorong dan memfasilitasi pembentukan kelompok informasi

b) Membina kelompok informasi social agar berperan dalam penyebaran informasi pemerintah dan pembangunan

c) Mengevaluasi dan memperlibatkan kelompok informasi social andalan ke Provinsi dan ketingkat Nasional

d) Memperdayakan kelompok informasi sosial menangkal informasi negative dan isu-isu yang tidak benar

24) Seksi Pelayanan Informasi Mobile mempuyai tugas :

a) Melaksanakan kegiatan pertunjukkan flim

b) Membuat (memproduksi) bahan materi siaran

c) Melaksanakan siaran umum dan siaran khusus

d) Melaksanakan pelayanan sound sistem

25) Seksi Ceramah dan Dialog mempunyai tugas :

a) Menyiapkan bahan (materi) ceramah dialog

b) Melaksanakan ceramah dialog dengan masyarakat umum

c) Melaksanakan cermah dialog pada tokoh masyarakat

26) Bidang Media Informasi mempunyai tugas :

a) Membuat dan mengusulkan rencana kegiatan yang meliputi pembinaan media cetak, pembinaan media radio, TV dan pengendalian informasi dan pameran

b) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dari pembinaan media cetak, pembinaan media radio, TV dan flim pengendalian informasi dari pameran

c) Memfasilitasi, melayani pihak-pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan media informasi

d) Melaporkan kegiatan-kegaiatan yang dilaksanakan bidang media informasi kepada atasan

27) Seksi Media Cetak mempunyai tugas :
    a) Mendorong dan memfasilitasi pendirian media cetak dan penerbitan
    b) Membina dan mengeluasi muatan media cetak dan prenerbitan
    c) Memberdayakan kelompok-kelompok media cetak/penerbitan untuk menyebarkan informasi pemerintah dan pembangunan
28) Seksi Media TV dan Radio Flim mempunyai tugas:
    a) Mendororng dan memfaslilitasi pendirian TV
    b) Mengawasi dan menerbitkan peredaran kaset CD, radio dan flim
29) Seksi Pengendalian Informasi dan Pameran mempunyai tugas:
    a) Menyiapkan bahan pengendalian informasi dan pameran
    b) Menginventarisir bahan pameran dari pemerintah
    c) Mennyiapkan rencana pameran antar kabupaten, pameran keliling dan pameran pembangunan
30) UPTD Balai Pengujian Bermotor mempunyai tugas :
    a) Mengkoordinasi tugas-tugas administrasi dan teknis pada balai pengujian kendaraan bemotor
    b) Mengawasi da melaksanakan pengoperasian peralatan mekanis balai pengujian kendaraan bermotor

c) Memfasilitasi pejabat fungsional di UPTD PKD untuk mengetahui pengetahuan tentang kemajuan/perubahan teknologi otomatif

31) Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a) Merencanakan dan melaksanakan secara umum ketatausahaan, kepegawaian, administrasi, dan fasilitas balai pengujian kendaraan bermotor

b) Membantu pembukuan, tata kedataan, jumlah kendaraan yag akan diuji dan hasil rupa uji secara harian, bulanan, dan tahunan

c) Merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan pengoperasian mekanik uji kendaraan

d) Menghitung daya angkut yang akan dituju pertama kali

e) Melaksanakan pemeriksaan fisik dan menilai kelayakan kendaraan bermotor yang dianjurkan untuk dilelang atau dijual oleh instansi pemerintah atau swasta

f) Melaksanakan pemeriksaan kelalaian jalan kendaraan bermotor dijalan, terminal, dan di tempat-tempat lain yang ditunjuk secara koordinasi

g) Melaksanakan uji petik kelayakan jalan kendaraan bermotor di daerah yang jauh dari balai pengujian kendaraan bermotor secara berkala (toumi)

h) Merekomendasi tentang alat-alat tambahan perubahan modifikasi pada kendaraan bermotor wajib uji agar tetap layak jalan

32) UPTD Terminal mempunyai tugas :

a) Membantu dan mengujikan rencana kegiatan UPTD terminal yang meliputi urusan umum pengawasan operasional

b) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan umum dan pengawasan operasional

c) Memfasilitasi dan melayani pihak-pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan tugas-tugas UPTD terminal

d) Membantu laporan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan dan akhir tahun.

5. Data yang digunakan

a. Penentuan target yang belum realistis

Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam menerapkan anggaran retribusi parkir di tepi jalan umum belum realistis. Hal ini terlihat saat penulis melakukan wawancara langsung dengan kepala bagian retribusi parkir yang dijelaskan bahwa penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum masih bergantung pada jumlah kendaraan yang ada atau sama dengan jumlah kendaraan yang parkir. Jumlah kendaraan yang parkir pada setiap hari nya juga tidak menentu, hal

seperti inilah yang membuat penerimaan retribusi belum terealisasi.

Penentuan target yang di tentukan pemerintah juga terkadang melebihi dari keadaan yang ada dilapangan. Penentuan target yang besar ini menjadi tugas berat karyawan terutama kepala bagian retribusi parkir untuk merealisasikan target tersebut dengan keadaan yang ada. Mereka berupaya semaksimal mungkin untuk target ini tercapai dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Penentuan target yang dikatakan realistis itu dengan adanya perencanaan dan penerimaan yaitu penyusunan rencana laju perkembangan (analisa anggaran dan realisasi), memperluas basis penerimaan dengan menambah jumlah dan jenis objek, menetapkan target realistis dengan memperhatikan potensi, kemampuan ekonomi dan peraturan yang relevan dan efektif.

b. Sistem pengendalian dan pengawasan di lapangan

Sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan ini harus lebih di tingkatkan karena kalau tidak di perhatikan secara lebih baik akan membuat banyak terjadinya kebocoran atau kelolosan dalam penerimaan retribusi. Kalau kebocoran atau kelolosan dalam penerimaan retribusi parkir ini dibiarkan begitu saja bisa membuat dampak yang buruk dalam merealisasikan target retribusi yang ditetapkan. Hal seperti ini membuat dana yang seharusnya

diperuntukan untuk meningkatkan PAD tetapi malah dinikmati oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang menyebabkan terjadinya kebocoran atau kelolosan penerimaan retribusi parkir adalah masih banyaknya terdapat parkir-parkir liar yang ada di lapangan yang belum dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang, untuk sumber daya manusia (SDM) atau juru parkir liar tersebut belum mengenal cara membuat surat tugas parkir dan mendaftarkan diri untuk menjadi juru parkir resmi ke Dinas Perhubungan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kota Palembang antara lain :

a. Penerimaan target yang belum realistis

Tabel IV.1
Data Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
Dinas Perhubungan Kota Palembang
Tahun 2012-2014

Tahun	Target	Realisasi	Persentasi Tidak Tercapai
2012	Rp11.555.000.000,00	Rp 5.723.811.192,00	50,44 %
2013	Rp 6.297.000.000,00	Rp 5.253.836.863,03	16,57 %
2014	Rp 7.241.550.000,00	Rp 6.322.212.321,34	12,70 %

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2015

Tabel IV.1 di atas menunjukkan bahwa salah satu penyebab rendahnya persentase penerimaan retribusi parkir terhadap retribusi daerah adalah tingkat target anggaran penerimaan retribusi parkir tidak seimbang atau mengalami fluktuasi dengan target yang telah dianggarkan. Dimana pada tahun 2012 persentasi tidak tercapai antara target dan realisasi adalah 50,44 % , tahun 2013 persentasi tidak tercapainya 16,57 % dan tahun 2014 persentasi tidak tercapainya 12,70 %.

Data penerimaan retribusi parkir Kota Palembang tergambar pada tabel IV.I di sana terlihat bahwa penerimaan retribusi parkir mengalami fluktuasi dengan target yang telah dianggarkan. Cara penentuan anggaran tersebut masih bersifat historis yang hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah yang diterima dalam setiap harinya.

Masalah utama anggaran yang terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep *value for money*. Karena penerimaan retribusi parkir tersebut masih menggunakan perhitugan tradisional yang hanya menambahkan penerimaan yang masuk disetiap harinya. Tanpa adanya cara perhitungan mengenai dasar sumber penerimaan retribusi tersebut.

Penentuan target retribusi pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan kepentingan nasional dan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Penentuan target retribusi tersebut merupakan hasil keputusan rapat para anggota Dewan Perwalilan Rakyat

(DPR) dan pemerintah daerah. Tetapi hasil keputusan rapat mengenai target retribusi tersebut terlalu besar dan tidak sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan. Dinas Perhubungan Kota Palembang selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan retribusi parkir tersebut mempunyai tugas besar untuk merealisasikan target tersebut guna meningkatkan PAD.

Penerimaan retribusi parkir tersebut dengan melakukan perhitungan secara tradisional, yaitu dengan cara melihat dari berapa pemasukkan uang dari para petugas parkir kepada kolektor atau staf Dinas Perhubungan disetiap harinya yang di tugaskan untuk mengambil uang dan mengawasi keadaan dilapangan. Tentunya perhitungan seperti ini kurang efektif dilakukan, dikarenakan di setiap harinya pemasukkan dari petugas parkir kepada kolektor tidak tetap selalu mengalami fluktuatif atau perubahan. Hasil yang diperhitungkan tersebut di putuskan oleh pemerintah Kota Palembang untuk tetap digunakan kedepan dan disepakati bahwa untuk tidak melakukan perubahan target yang akan dicapai. Dasar perhitungan dalam menentukan sumber penerimaan retribusi guna mencapai penerimaan retribusi guna mencapai target yaitu dengan melihat tingkat penggunaan jasa tersebut, tarif retribusi daerah, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah.

Menurut penulis, pemerintah Kota Palembang seharusnya dalam penentuan target harus memiliki dasar perhitugan dalam menentukan sumber penerimaan retribusi guna mencapai target yang telah ditentukan.

b. Masih Tingginya Tingkat Kebocoran Atau Kelolosan

Dalam sistem pengendalian dan pengawasan dibeberapa instansi pemerintah yang memungut retribusi sering terjadi disebabkan oleh masih banyaknya terdapat parkir-parkir liar yang ada dilapangan dan belum mengetahui cara membuat surat tugas parkir. Sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan harus lebih ditingkatkan untuk menghindari lebih banyaknya terjadi kebocoran dan kelolosan dalam penerimaan retribusi. Hal seperti ini membuat dana yang seharusnya diperuntukan untuk meningkatkan PAD tetapi malah dinimati oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pemungutan retribusi parkir sebaiknya dilakukan :

1) Melakukan Pendataan

Dinas Perhubungan harus melakukan pendataan terhadap juru parkir dan koordinator dilapangan guna tidak terjadi lagi kebocoran atau kelolosan dalam pengambilan retribusi parkir tersebut.

2) Melakukan Pembinaan

Dinas Perhubungan dalam meningkatkan penerimaan retribusi selalu melakukan pendataan. Untuk itulah perlu dilakukan pembinaan kepada petugas parkir dan wajib retribusi agar dapat meningkatkan kesadaran wajib retribusi dalam menggunakan jasa yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan.

Pembinaan terutama di lakukan kepada para juru parkir ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang baik dalam melakukan tugasnya. Karena kurangnya SDM terutama para juru parkir ialah kurangnya pengetahuan yang dimilikinya.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang mengenai program kegiatan pembinaan adalah perlunya pembinaan dan koordinasi antara pihak Dinas Perhubungan dan para juru parkir yang ada. Dimana program pembinaan dilakukan oleh kepala bagian bidang perparkiran dan menyepakati peraturan yang ada. Para juru parkir diberikan pengarahan terhadap apa yang akan mereka lakukan.

Solusi terbaik yang semestinya dilakukan Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah melatih seluruh staf karyawan pada semua bidang (tanpa terkecuali), agar skill dan kualitas dari karyawan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang benar-benar bermutu.

c. Belum Primanya Layanan Karena Terbatasnya Sumber Daya Manusia Atau Petugas Pelaksana Dilapangan

Pemberlakuan sanksi yang mengatur tentang retribusi parkir sangat perlu diperhatikan, karena berfungsi untuk memperhatikan dasar hukum yang mengikat sehingga para wajib retribusi khususnya kepada orang yang menikmati jasa retribusi parkir dalam melakukan kewajiban dalam pembayaran retribusi.

Seperti yang tercantum diperaturan daerah nomor 4 Tahun 2008 tentang retribusi parkir Kota Palembang yang terdapat pada pasal 44 yang menyatakan bahwa "Dalam hal ini wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

Meskipun peraturan daerah mengenai sanksi dan ketentuan pidana telah ditetapkan akan tetapi permasalahan yang sering muncul adalah pelaksanaan sanksi dan ketentuan pidana yang diberikan kepada wajib retribusi masih kurang tegas dilakukan oleh para petugas pemungut retribusi dilapangan.

Menurut penulis, untuk dapat meningkatkan pengenaan sanksi maka Dinas Perhubungan harus meningkatkan penyuluhan kepada wajib retribusi baik secara langsung maupun secara tertulis dalam membayar retribusi dan lebih memperkuat proses pemungutan retribusi.

d. Sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan

Dalam pelaksanaan operasional dilapangan dengan lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para juru parkir dalam menjalankan tugasnya. Menurut penelitian yang saya lakukan kepada juru parkir belum dimilikinya jas hujan dalam operasional dilapangan untuk para juru parkir. Kalau cuaca hujan mereka masih berbasahan terkena air hujan dalam mengatur kendaraan yang diparkirkan. Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam

mewujudkan Palembang Kota Internasional dengan mengatur kendaraan yang parkir di tepi jalan umum. Pemerintah Kota Palembang dalam operasional di lapangan akan lebih ditingkatkan agar menjadi Kota yang aman, damai dan terwujud menjadi Kota Internasional.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Dinas Perhubungan Kota Palembang menurun

   Penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Dinas Perhubungan Kota Palembang menurun, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

   a) Penentuan target yang belum realistis
   b) Sistem pengendalian dan pengawasan di lapangan
   c) Tingkat efektifitas pemberlakuan sanksi
   d) Sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan

   Dalam pengendalian dan pengawasan dilapangan pihak Dinas Perhubungan sering terjadi kebocoran dan kelolosan yang disebabkan masih terdapatnya parkir-parkir liar yang belum dikelola Oleh Dinas Perhubungan. Hal seperti inilah yang menyebabkan penerimaan retribusi parkir belum terealisasi dan masih kurangnya pengawasan dilapangan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak terealisasi

   Dinas Perhubungan harus lebih baik lagi dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir, dengan mengunakan dasar perhitungan yang benar tidak lagi menghitung secara manual dengan menambahkan dan mengurangi penerimaan retribusi disetiap harinya dari juru parkir yang diserahkan kepada kolektor. Belum dimilikinya data based atau dasar mengenai sumber penerimaan, seharusnya harus diberlakukannya data based agar penerimaan retribusi meningkat. Untuk lebih baiknya Pengawasan dan pengendalian dilapangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang harus lebih dipertegas dan diperketat agar tidak terdapat lagi kebocoran dan kelolosan yang mempengaruhi penerimaan retribusi parkir, sehingga bisa meningkatkan penerimaan retribusi daerah semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.*Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Betti Arvita. *"Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Padang"*. Universitas Negeri Padang (UNP).

Lingga Mayasari. *"Analisis Rendahnya Penerimaan Retribusi Kebersihan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang"*. Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP).

Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Marihot Pahala Siahaan, 2005. *"Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.

Nur Indrianto dan Bambang Supomo, 2009.*Metodelogi Penelitian Bisnis*. Penerbit BEF, Yogyakarta.

Sugiyono, 2009.*Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta. Bandung.

Undang-undangNomor 34 tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 16 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transfortasi.

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2008, tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir

Tabel 4
Jadwal Penelitian

Keterangan	Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Ags			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Survei Pendahuluan																								
Proposal UP																								
Konsultasi Proposal UP																								
Seminar UP																								
Perbaikan UP																								
Pengambilan Data																								
Pengelolaan Data																								
Analisis Data																								
Penggandaan Skripsi																								
Ujian Komprehensif																								

mber : Penulis,2015

1. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

B. Landasan Teori

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

B. Lokasi Penelitian

C. Operasionalisasi Variabel

D. Data yang Diperlukan

E. Metode Pengumpulan Data

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelirian

B. Pembahasan Hasil Penelitian

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	: **Marisa Novalia**	PEMBIMBING	
NIM	: **22 2011 180**	KETUA	**Mizan, S.E., M.Si., Ak., CA**
PROGRAM STUDI	: **Akuntansi**	ANGGOTA	:
JUDUL SKRIPSI	: **ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG**		

NO	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	8/12 2015	Bab I S/2 III			perbaiki
2					
3	10/12 2015	Bab I S/2 III			Acc lanjut Bab IV.
4					
5	23/12 2015	Bab IV			perbaiki
6					
7	28/12 2015	Bab IV			perbaiki
8					
9	29/12 2015	Bab IV			Acc lanjut Bab V
10					
11	31/12 2015	skripsi			Acc u/ Sidang
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi. 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

Program Studi :

Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 441175 Faksimile : (0711) 442547 Kode Pos 30146
E-mail : dishub_palembang@yahoo.co.id, Website : www.dishub.palembang.go.id

Palembang, 1 September 2015

Nomor : 074 / 574 /DISHUB/2015
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Pengambilan Data

Kepada
Yth. Dekan Univ.Muhammadiyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Kota Palembang
Di -
Tempat

Sehubungan dengan Dekan Universitas Muhammadiyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Kota Palembang Nomor : 1313/H-5/FEB-UMP/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal ijin penelitian/pengambilan data, dengan ini diberitahukan bahwa:

NAMA : MARISA NOVALIA
NIM : 22 2011 180

Diperkenankan untuk melaksanakan penelitian/pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Palembang namun segala bentuk data/hasil yang diperoleh hanya digunakan untuk pengkajian ilmiah dan tidak untuk disiarkan, dalam pelaksanaannya menjadi tanggungan jawab mahasiswa/i yang bersangkutan.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG

DINAS PERHUBUNGAN

H. MASRIPIN HM. TOYIB, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590213 198003 1 002

Tembusan :
1.Walikota Palembang (Sebagai Laporan)
2.Kepala UPTD/Terminal/Dermaga Dishub Kota Plg
3.Arsip

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Unggul dan Islami

Sertifikat

330/J-10/FEB-UMP/SHA/VII/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA	:	**MARISA NOVALIA**
NIM	:	**222011180**
PROGRAM STUDI	:	**Akuntansi**

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ** (22) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 11 Juli 2015
an. Dekan
Wakil Dekan IV

Drs. Antoni, M.H.I.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263
Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637
email. lembagabahasaump@yahoo.co.id

TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name	:	Marisa Novalia
Place/Date of Birth	:	Palembang, July 22nd 1993
Test Times Taken	:	+1
Test Date	:	August 12th, 2015

Scaled Score

Listening Comprehension	:	51
Structure Grammar	:	34
Reading Comprehension	:	39
OVERALL SCORE	:	413

Palembang, August 20th, 2015
Head of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd.,M.A

NO. 361/TEA FE/LB/UMP/VI

NBM/NIDN. **1164932/0210098402**

123 Certificates

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

STATUS TERAKREDITASI

بسم الله الرحمن الرحيم

PIAGAM

No.509/H-4/LPKKN/UMP/III/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama	: Marisa Novalia
Nomor Pokok Mahasiswa	: 222011180
Fakultas	: Ekonomi
Tempat Tgl. Lahir	: Palembang, 22-07-1993

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-8 yang dilaksanakan dari tanggal 21 Januari sampai dengan 5 Maret 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa	: Karang Anyar
Kecamatan	: Gandus
Kota/Kabupaten	: Palembang
Dinyatakan	: LULUS

Palembang, 30 Maret 2015

Mengetahui

Ketua LPKKN

Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.

Ir. Alhanannasir, M.Si.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI	Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014	(B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)	Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014	(B)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)	Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011	(B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)	Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010	(B)

ite: umpalembang.net/feump Email : feumplg@gmail.com
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Senin , 11 Januari 2016
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
Nama : MARISA NOVALIA
NIM : 22 2011 180
Program Studi : Akuntansi
Bidang Studi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Mizan, S.E, M.Si, AK, CA	Pembimbing	3/2 -2016	
2	Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si	Ketua Penguji	3/2 -2016	
3	Mizan, S.E, M.Si, AK, CA	Penguji 1	3/2 -2016	
4	Nina Sabrina, S.E, M.Si	Penguji 2	29/1 - 2016	

Palembang, Januari 2016
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Rosalina Ghozali,SE.Ak.M.Si
NIDN/NBM : 0228115802/1021960

BIODATA PENULIS

Nama	:	Marisa Novalia
NIM	:	22 2011 180
Tempat/Tanggal Lahir	:	Palembang, 22 Juli 1993
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	:	Akuntansi
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	Jl. Ariodillah III Rt/Rw : 34/11 No. 2488
No. Handphone	:	0853-69241771 / 0896-37677950
Email	:	marisanovalia@yahoo.com
Nama Orang Tua		
Bapak	:	Komari
Ibu	:	Misratini (Almh)
Pekerjaan Orang Tua		
Bapak	:	Buruh Bangunan
Ibu	:	-
Alamat Orang Tua	:	Jl. Ariodillah III Rt/Rw : 34/11 No. 2488

Palembang, Desember 2015

Penulis,

(Marisa Novalia)